



Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Irlan Rahman¹, Wahyudin Hasan², Zubaidah Rahman³, Lianti Polapa⁴.

^{1,2,3,4} Universitas Gorontalo

Email: ilanhman@gmail.com

Keywords:

Good Governance;
Accountability;
Transparency;
Participation;
APBDesa Management

Abstract. *This research investigates how the application of good governance principles specifically accountability, transparency, and participation affects the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) within the village administrations of Tolangohula District. Employing a quantitative approach, data were collected through questionnaires administered to 60 respondents across 15 villages. The analysis was conducted using multiple linear regression with SPSS version 27. The findings reveal that accountability has a positive but statistically insignificant influence, transparency exerts a significant negative effect, and participation has a significant positive impact on APBDesa management, both individually and collectively. These results suggest that the stronger the implementation of good governance practices, the more efficient the village budget management becomes.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penerapan prinsip *good governance*, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada pemerintah desa se-Kecamatan Tolangohula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 60 responden yang berasal dari 15 desa. Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dengan dukungan perangkat lunak SPSS versi 27. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, akuntabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan, transparansi memberikan pengaruh negatif yang signifikan, dan partisipasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengelolaan APBDesa. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka semakin meningkat pula efektivitas dalam pengelolaan anggaran desa.

Corresponden author:

Email: ilanhman@gmail.com

Pendahuluan

Penerapan desentralisasi di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk kewenangan tersebut diwujudkan melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang menjadi instrumen utama dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Besarnya dana yang dikelola pemerintah desa menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) agar pengelolaan APBDesa dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip *good governance* menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Lamuda et al. (2022), penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, merupakan syarat penting dalam pengelolaan keuangan desa guna menjamin terciptanya keberlanjutan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Saprudin dan Rahman (2020) menyatakan bahwa semakin baik penerapan prinsip *good governance*, maka semakin tinggi pula kualitas pelaporan keuangan desa yang dihasilkan.

Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan tiga prinsip utama dalam *good governance* yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas. Akuntabilitas menuntut pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Transparansi memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat sehingga proses pengelolaan APBDesa dapat diketahui secara terbuka dan diawasi bersama. Sementara itu, partisipasi masyarakat memberikan kesempatan kepada warga untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan anggaran desa. Penerapan ketiga prinsip tersebut secara terpadu diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan APBDesa.

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan APBDesa masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu fenomena yang ditemukan berada di Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Dalam praktiknya, transparansi pengelolaan keuangan desa masih belum optimal karena penyampaian informasi kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan anggaran desa masih relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* belum berjalan secara optimal sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan APBDesa.

Fenomena tersebut sejalan dengan hasil penelitian Ali et al. (2023) dan Lantowa dan Sadikin (2021) yang mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengelolaan keuangan desa serta terbatasnya akses terhadap informasi yang transparan dan akurat menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya tata kelola keuangan desa yang efektif. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menyebabkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa menjadi kurang optimal, sehingga tujuan pembangunan desa belum sepenuhnya dapat dicapai secara maksimal.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh penerapan prinsip *good governance* terhadap pengelolaan keuangan desa di berbagai wilayah. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh penerapan prinsip *good governance* yang diprosikan melalui akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada pemerintah desa se-Kecamatan Tolangohula masih relatif terbatas. Selain itu, karakteristik sosial, ekonomi, serta kapasitas aparatur desa yang berbeda pada setiap daerah memungkinkan adanya

perbedaan hasil penelitian, sehingga diperlukan penelitian yang sesuai dengan kondisi lokal Kecamatan Tolangohula.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul "Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Governance* terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan APBDesa pada pemerintah desa se-Kecamatan Tolangohula. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian mengenai tata kelola pemerintahan desa, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan APBDesa secara akuntabel, transparan, dan partisipatif guna mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Metode analisis data yang diterapkan adalah regresi linier berganda untuk menguji pengaruh penerapan prinsip *good governance* yang mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan APBDesa pada tingkat pemerintah desa di Kecamatan Tolangohula. Seluruh proses analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik guna memperoleh hasil yang objektif dan terukur.

Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Efektivitas pengelolaan APBDesa (variabel dependen/terikat)
- X1 = Akuntabilitas (Variabel independen prinsip *good governance*)
- X2 = Transparansi (Variabel independen prinsip *good governance*)
- X3 = Partisipasi (Variabel independen prinsip *good governance*)
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- e = Tingkat kesalahan (*error*)

Hasil Dan Pembahasan

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian mampu secara akurat mengukur variabel yang dituju serta menghasilkan data yang relevan dari para responden (Rohma, 2022). Proses validitas dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total variabel yang bersangkutan. Nilai korelasi tersebut (r-hitung) kemudian dibandingkan dengan nilai r-tabel berdasarkan tingkat signifikansi tertentu, umumnya pada taraf 5%, dan disesuaikan dengan jumlah sampel. Suatu item dikategorikan valid apabila r-hitung lebih besar dari r-tabel (r-hitung > r-tabel). Sebaliknya, apabila nilai r-hitung sama dengan atau lebih kecil dari r-tabel (r-hitung ≤ r-tabel), maka item tersebut dianggap tidak valid. Tahapan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar andal dan dapat digunakan secara sah dalam proses analisis penelitian.

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa seluruh item pernyataan kuisisioner pada seluruh variabel penelitian akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengelolaan APBDesa, menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai r-hitung melebihi r-tabel yaitu 0,254 serta signifikansi di bawah 0,05. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dalam kuesioner terbukti memenuhi kriteria validitas dan dinyatakan layak untuk digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *SPSS for Windows* untuk menilai konsistensi internal instrumen penelitian, khususnya kuesioner yang digunakan sebagai indikator variabel. Menurut (Saputra et al., 2022), reliabilitas dapat diuji menggunakan metode statistik *Cronbach's Alpha* (α). Sebuah instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* melebihi 0,60, yang menunjukkan bahwa item-item dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang memadai dan dapat diandalkan dalam pengumpulan data. Adapun hasil pengujian reliabilitas masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Standar Reabilitas	Keterangan
1	Akuntabilitas	0,918	0,60	<i>Reliable</i>
2	Transparansi	0,870	0,60	<i>Reliable</i>
3	Partisipasi	0,826	0,60	<i>Reliable</i>
4	Pengelolaan APBDesa	0,877	0,60	<i>Reliable</i>

Sumber: data di olah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, seluruh variabel penelitian yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan pengelolaan APBDesa memiliki nilai koefisien *Cronbach's Alpha* di atas 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan memiliki tingkat reliabilitas yang memadai, sehingga data yang diperoleh dapat dianggap konsisten dan dapat dipercaya. Dengan demikian, seluruh konstruk variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria sebagai alat ukur yang layak dan valid.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagai variabel independen terhadap pengelolaan APBDesa sebagai variabel dependen. Hasil analisis disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	9.097	3.529		2.578
	Akuntabilitas	.185	.117	.157	1.581
	Transparansi	-.230	.104	-.221	-2.215
	Partisipasi	.659	.098	.656	6.724

a. Dependent Variable: Pengelolaan APBDesa

Sumber: data di olah dari SPSS, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan $Y = 9,097 + 0,185X_1 - 0,230X_2 + 0,659X_3$. Nilai konstanta 9,097 menunjukkan prediksi nilai pengelolaan APBDesa saat seluruh variabel independen konstan. Variabel akuntabilitas berpengaruh positif sebesar 0,185 terhadap pengelolaan APBDesa, namun tidak signifikan karena nilai signifikansinya 0,120 ($> 0,05$). Variabel transparansi berpengaruh negatif signifikan sebesar -0,230, dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Sedangkan partisipasi memiliki pengaruh positif paling kuat sebesar 0,659 dan signifikan ($< 0,001$), yang berarti semakin tinggi partisipasi, maka pengelolaan APBDesa juga semakin baik.

Uji T

Uji t dilakukan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi secara parsial terhadap pengelolaan APBDesa di Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Hasil dari uji T di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Uji T

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	9.097	3.529		2.578
	Akuntabilitas	.185	.117	.157	1.581
	Transparansi	-.230	.104	-.221	-2.215
	Partisipasi	.659	.098	.656	6.724
					Sig.
					.013
					.120
					.031
					.000

a. Dependent Variable: Pengelolaan APBDesa

Sumber: data di olah dari SPSS, 2025

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas (X_1) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan APBDesa ($t = 1,581$; $p = 0,120 > 0,05$). Variabel transparansi (X_2) memberikan pengaruh negatif yang signifikan ($t = -2,215$; $p = 0,031 < 0,05$), menandakan bahwa peningkatan transparansi tidak selalu berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengelolaan. Sebaliknya, partisipasi (X_3) berpengaruh positif secara signifikan ($t = 6,724$; $p < 0,001$), yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBDesa di Kecamatan Tolangohula.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengukur pengaruh bersama (simultan) dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan tujuan menilai kelayakan model regresi secara keseluruhan. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan model dianggap signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hasil dari uji F di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	121.470	3	40.490	16.535
	Residual	137.130	56	2.449	
	Total	258.600	59		
					Sig.
					.000 ^b

a. Dependent Variable: Pengelolaan APBDesa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: data di olah dari SPSS, 2025

Hasil uji F memperlihatkan nilai F sebesar 16,535 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang mengindikasikan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan APBDesa di Kecamatan Tolangohula. Oleh karena itu, hipotesis nol (H_0) ditolak dan model regresi ini dianggap layak untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur seberapa besar variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh yang

terbatas, sedangkan nilai yang mendekati 1 mengindikasikan pengaruh yang kuat. Pada penelitian ini, variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dianalisis untuk mengetahui besarnya kontribusi terhadap pengelolaan APBDesa di Kecamatan Tolangohula. Hasil nilai R^2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Determinan (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 ^a	.470	.441	1.565

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: data di olah dari SPSS, 2025

Berdasarkan hasil Model Summary, koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,470 mengindikasikan bahwa variabel partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi bersama-sama mampu menjelaskan 47% variasi dalam pengelolaan APBDesa. Sedangkan 53% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti integritas aparatur, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, maupun sistem pengawasan internal.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tolangohula

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kecamatan Tolangohula. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi linear berganda, di mana nilai koefisien regresi akuntabilitas sebesar 0,185 dengan tingkat signifikansi 0,120, yang melebihi batas 0,05. Nilai t hitung sebesar 1,851 juga lebih kecil dari t tabel pada taraf signifikansi 5%, menandakan bahwa secara statistik, pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDesa belum signifikan. Meskipun demikian, arah koefisien yang positif mengindikasikan bahwa akuntabilitas tetap memiliki kontribusi dalam mendorong pengelolaan APBDesa ke arah yang lebih baik. Artinya, semakin tinggi penerapan prinsip akuntabilitas oleh aparatur desa, semakin besar pula potensi perbaikan dalam tata kelola anggaran desa, meskipun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Lussy & Utomo, 2024), yang menyatakan bahwa akuntabilitas belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan APBDesa di beberapa wilayah, yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya kualitas pelaporan keuangan serta rendahnya evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Akuntabilitas tidak cukup hanya dipenuhi sebagai persyaratan administratif, namun harus diwujudkan dalam praktik pelaporan yang transparan, dapat diakses publik, serta diawasi secara efektif.

Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa perlu didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia desa, penyusunan laporan keuangan yang akurat dan informatif, serta perbaikan sistem pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian, meskipun secara statistik hipotesis mengenai pengaruh akuntabilitas tidak didukung, secara teoritis akuntabilitas tetap relevan dan penting sebagai salah satu fondasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tolangohula

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa transparansi memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengelolaan APBDesa di Kecamatan Tolangohula. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,230 dan tingkat signifikansi 0,031 ($p < 0,05$). Artinya, peningkatan transparansi justru berkorelasi dengan penurunan efektivitas pengelolaan anggaran desa. Fenomena ini diduga karena pelaksanaan transparansi masih bersifat administratif dan kurang partisipatif, seperti pemasangan baliho APBDesa yang tidak disosialisasikan secara optimal dan sulit dipahami masyarakat. Wawancara dengan Sekretaris Desa Ombulo Tango (7 Januari 2025) mengungkapkan bahwa rendahnya penggunaan media sosial oleh warga menjadi kendala dalam distribusi informasi. Akun

resmi desa pun jarang diperbarui, mencerminkan minimnya literasi digital dan partisipasi warga dalam pengawasan anggaran. Indikator transparansi yang paling lemah terletak pada aksesibilitas dan pemahaman informasi. Banyak warga mengaku tidak memahami isi APBDesa karena format penyajian yang terlalu teknis.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Harahap dalam (Lussy & Utomo, 2024), yang menyatakan bahwa transparansi tanpa disertai penyediaan informasi yang mudah diakses akan gagal mendorong keterlibatan masyarakat. (Yulianto, 2022), juga menekankan bahwa transparansi yang tidak dibarengi peningkatan pemahaman publik dapat memicu kesalahpahaman dan konflik sosial. Dengan demikian, transparansi tidak cukup hanya berupa keterbukaan informasi, melainkan juga harus menjamin pemahaman dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa perlu mengembangkan strategi komunikasi yang interaktif dan mudah diakses, seperti forum musyawarah atau digitalisasi informasi berbasis kebutuhan lokal. Hasil ini menegaskan bahwa meskipun hipotesis menyatakan pengaruh positif signifikan, arah negatif yang ditemukan tetap memberikan kontribusi teoritis penting terkait kualitas implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan transparansi dalam pengelolaan APBDesa tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana informasi dipublikasikan, tetapi juga oleh kualitas penyampaian informasi tersebut sehingga dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Transparansi yang bersifat formalitas administratif tanpa disertai upaya edukasi, sosialisasi, dan komunikasi yang efektif belum mampu meningkatkan kepercayaan maupun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengubah paradigma transparansi dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menjadi instrumen untuk membangun hubungan yang lebih terbuka, komunikatif, dan kolaboratif dengan masyarakat. Dengan demikian, informasi yang disampaikan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBDesa sehingga tujuan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat tercapai secara optimal.

Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tolangohula

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDesa di Kecamatan Tolangohula. Keterlibatan dalam forum musyawarah desa menjadi indikator yang paling dominan, terutama di desa-desa seperti Gandasari dan Sukamakmur, di mana masyarakat mulai aktif terlibat dalam penyusunan program prioritas serta pengawasan anggaran. Meski demikian, partisipasi masyarakat di beberapa desa lain masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengelolaan APBDesa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga memperkuat pengawasan sosial. Ketika warga terlibat sejak tahap perencanaan, aparat desa cenderung lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana karena merasa diawasi. Temuan ini konsisten dengan (Yulianto, 2022), yang menyatakan bahwa partisipasi efektif mampu mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Putri dan Maryono dalam (Nabilla & Desitama, 2023), juga menegaskan bahwa keterlibatan langsung warga secara signifikan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Hal serupa dikemukakan oleh (Lussy & Utomo, 2024), yang menyatakan bahwa partisipasi memberi pemahaman dan menjadi kontrol sosial terhadap pengelolaan dana.

Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat bukan hanya tuntutan administratif semata, melainkan juga merupakan faktor penting dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Hipotesis penelitian ini, yakni "Partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBDesa", terbukti diterima secara statistik dan didukung oleh data empiris. Temuan ini memperkuat pentingnya pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan anggaran untuk menciptakan tata kelola desa yang responsif dan bertanggung jawab.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tolangohula

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan APBDesa di wilayah Kecamatan Tolangohula. Temuan ini menguatkan bahwa penerapan ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa sesuai dengan prinsip *good governance*. Namun, secara parsial, akuntabilitas memberikan dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan APBDesa. Meski demikian, akuntabilitas atau sistem pertanggungjawaban yang jelas tetap esensial dalam mencegah penyimpangan anggaran dan membangun kepercayaan publik. Transparansi juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan secara statistik, tetapi tetap berperan penting dalam menyediakan akses informasi terbuka dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Hambatan seperti rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan akses informasi yang ramah masyarakat menjadi tantangan utama (Lussy & Utomo, 2024). Di lain pihak, partisipasi masyarakat menunjukkan pengaruh paling kuat dan signifikan. Keterlibatan aktif warga dalam forum musyawarah, perencanaan, serta pengawasan anggaran berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan desa (Nurfitri & Ratnawati, 2023).

Temuan ini konsisten dengan hasil studi yang dilakukan oleh (Kaiwai et al., 2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan maupun parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kampung Enggros, Jayapura. Selain itu, penelitian (Setyaningrum et al., 2024) di Kecamatan Banyudono mengungkapkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berkontribusi signifikan terhadap pengelolaan dana desa, meskipun secara parsial hanya akuntabilitas dan transparansi yang menunjukkan pengaruh signifikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas pengelolaan APBDesa di Kecamatan Tolangohula memerlukan penguatan kapasitas aparatur desa, perluasan akses informasi bagi publik, serta pengaktifan kembali forum musyawarah desa. Pelaksanaan prinsip *good governance*, khususnya aspek akuntabilitas dan partisipasi, dinilai sangat berperan dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan serta mengurangi potensi penyimpangan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada pemerintah desa di wilayah Kecamatan Tolangohula, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut (1) Akuntabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan APBDesa, yang diduga disebabkan oleh lemahnya sistem pertanggungjawaban dan rendahnya pemahaman aparatur desa terkait pelaporan. (2) Transparansi berpengaruh negatif signifikan, mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi tanpa dukungan kapasitas komunikasi yang memadai dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. (3) Partisipasi memiliki pengaruh positif signifikan, yang berarti semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin baik pengelolaan keuangan desa. (4) Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDesa, menunjukkan bahwa kombinasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi secara bersama-sama mampu meningkatkan kualitas tata kelola anggaran desa.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan prinsip *good governance* terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pemerintah desa diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan APBDesa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, penyampaian informasi anggaran secara

terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan anggaran desa. Dengan demikian, pengelolaan APBDesa diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan terhadap pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Pembinaan yang berkelanjutan, disertai dengan evaluasi dan peningkatan kompetensi aparatur desa, diharapkan mampu memperkuat kualitas tata kelola keuangan desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan musyawarah desa maupun pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran merupakan salah satu bentuk pengawasan sosial yang dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, C. M., Boku, Z., & Usman. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(4), 259–273.
- Kaiwai, H. Z., Mayor, V. I., Bisai, C. M., & Rumlatur, T. (2022). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.56076/jkesp.v7i1.2171>
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.1.41-48.2022>
- Lantowa, F. D., & Sadikin, N. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dan Transparansi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolanghula Kabupaten Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Publik*, 4(2), 57. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.57-65.2021>
- Lussy, M., & Utomo, R. B. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Biak Numfor Distrik Biak Timur Kampung Soryar. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN) Volume*, 05(113), 384–393.
- Nabilla, S. D., & Desitama, F. S. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (costing)*, 7(1), 1347–1359. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6260>
- Nurfritri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya*, 6(2), 1794–1805. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Rohma, A. (2022). *Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Pemerintah Desa Rowotengah*
http://digilib.uinkhas.ac.id/9107/%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/9107/1/ArisaturRohma_E20183094.pdf
- Saprudin, & Rahman, Z. (2020). Pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. *Proceedings of IICSDGs*, 1, 144–163.
- Saputra, R., Darmanto, D., & Ningsih, S. (2022). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Juwiring. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 2(2), 86–98. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v2i2.438>
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3(3), 581–589. <https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323>

Yulianto, A. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 123–145.